

SKRIPSI
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN GENDER DALAM
PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN
POLEWALI MANDAR



Oleh :

Muthmainnah Putri Husaeni

E051 191 044

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
MAKASSAR
2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN GENDER DALAM
PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Disusun dan di ajukan oleh :
MUTHMAINNAH PUTRI HUSAENI

E051 191 044

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang di bentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan dinyatakan telah
memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing I



Prof. Dr. Nurlinah, M.Si.
NIP. 19630921 1987 02 2 001

Pembimbing II



Rahmatullah, S.IP. M.Si.
NIP. 19770513 2003 12 1 002

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 1991 01 1 001

**LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN GENDER DALAM
PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

MUTHMAINNAH PUTRI HUSAENI

E051 191 053

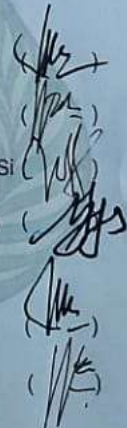
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Makassar, 17 Agustus 2023

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua	: Prof. Dr. Nurlinah, M.Si
Sekretaris	: Rahmatullah, S.IP, M.Si
Anggota	: Prof. Dr. Djuanda Nawawi, M.Si
Anggota	: Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si
Pembimbing Utama	: Prof. Dr. Nurlinah, M.Si
Pembimbing Pendamping	: Rahmatullah, S.IP, M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muthmainnah Putri Husaeni

NIM : E051191044

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan yang berjudul:

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN GENDER DALAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan skripsi saya ini hanya karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 17 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Muthmainnah Putri Husaeni

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Shalom, Om Swastyastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pemberdayaan Gender Dalam Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Polewali Mandar”**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Dengan berbagai dinamika yang dihadapi, penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak dapat dipungkiri, tantangan serta hambatan juga menjadi kawan dalam proses selama penyusunan skripsi ini. Akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini namun menjadi lebih usaha, niat serta tekad yang kuat dalam waktu penyelesaiannya. Dukungan serta doa dari berbagai pihak menjadi penyemangat bagi penulis selama menjalani masa perkuliahan hingga pada masa penyelesaian studi di Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini izinkan juga penulis memberikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, khususnya Ummi yang telah melahirkan, membesarkan, menyayangi dan mendidik penulis seorang diri semenjak ditinggal ajal oleh suaminya, sehingga penulis dapat tumbuh dan berkembang seperti saat ini. Ucapan terima kasih juga kepada tante iye' Nala yang telah mendidik, menyayangi dan membantu penulis dalam segala hal hingga penulis bisa menyelesaikan bangku perkuliahan. Terimakasih telah menjadi orang terkasih yang sempurna dan Terima kasih banyak atas segala cinta dan kasih sayang, dukungan moril dan materil kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas nilai-nilai kehidupan yang senantiasa diberikan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang terus berusaha melayakkan diri sebagai manusia yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan, memberikan kesehatan, dan melindungi setiap langkah kehidupan kepada kedua orang tua penulis.

Melalui kesempatan ini, penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1);

2. **Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan;
3. **Dr. A. M. Rusli, M.Si** selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberi banyak bantuan dan kesempatan menuntut ilmu hingga dapat meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan;
4. **Prof. Dr. Nurlinah, M.Si** selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dan memberikan arahan, saran, serta bantuan sejak proposal hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. **Rahmatullah, S.IP. M.Si** selaku Pembimbing II yang juga telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dan memberikan arahan, saran, serta bantuan sejak proposal hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Para tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik;
7. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si, (Alm) Prof Dr.A. Gau Kadir, MA, Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si, Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si, Prof. Dr. Hj. Nurlinah,**

M.Si, Dr. Hj. Indar Arifin, M.Si, (Alm) Dr. H. Andi Syamsu Alam, M.Si, Dr. H. A.M. Rusli, M.Si, Suhardiman Syamsu, M.Si, Dr. Jayadi Nas, M.Si, Dr. Andi Lukman Irwan, S.IP, M.Si, Rahmatullah, S.IP, M.Si, AsharPrawitno, S.IP, M.Si, Saharuddin S.IP, M.Si, yang telah memberikan pengetahuan dalam jenjang perkuliahan sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin:

8. Para pegawai dan staf akademik Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terkhusus Bapak **Mursalim Mile S.IP** yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam memenuhi berkas administrasi penulis;
9. Seluruh staf tata usaha serta staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dalam hal persuratan dan pelayanan administrasi;
10. Para informan dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan baik menerima dan memberikan bantuan berupa perizinan untuk melakukan pengumpulan data dan melakukan wawancara;
11. Terima kasih untuk **Nanda Riyan** yang telah menjadi “911” bagi penulis dalam menjalani sisa hidup merantau di makassar, terima kasih telah sangat membantu, memotivasi, dan selalu menjadi support sistem penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman pernongkian dan Tgoex , **Fuji, Dila, Atul, Elsi, Ria, Irsyad, Kalu, Aqila, Pije, Lube, Erna, dan Nanda.**

13. Teman-teman **Posko 5 KKNT Takalar**, Galesong Utara, desa Tamalate gelombang 108 Unhas, **Rafi, Eca, Rich, Hani, Ainun, Ela, Musda, dan Kiya**.
14. Saudara– saudari seperjuangan sejak menyandang status mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas. Saudaraku **Zeitgeist 2019**, Mulai dari **Andes selaku ketua angkatan, Amirul, Adam, Hafiqi, Zaky, Edli, Ilham, Viko, Firga, Ibnu, Eki, Wahyu, Ramlan, Rafli, Acos, Fajri, Tisa, Ila, Umik, Aldi, Indah a, Lala, Lili, Lulu, Nunu, Puput, Stevy, Venike, Pute, Nisa, dan Kika**. Terima kasih atas segala kisah suka duka yang kita lalui bersama dan semoga itu abadi dikenangan kita semua.
15. Keluarga besar **Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem) FISIP Unhas**, yang telah menyertai kehidupan kemahasiswaan penulis, menjadi rumah tempat dimana ada banyak suka dan duka, memberikan banyak proses mendewasakan diri. Terima kasih atas segala cerita dan ilmu serta kesempatan berperan sebagai kakak yang berbagi maupun sebagai adik yang dibimbing. Terima kasih atas kebersamaannya, kesempatan berkarya, kekeluargaan yang telah diberikan.
16. Last but not least, i wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thankme for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and

tryna give more than I recieve, I wanna thank me for trynaa do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.

Terima kasih juga kepada kalian semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Baik Keluarga, teman-teman, maupun pihak lain yang telah membantu penulis dalam menjalani pendidikan di Universitas Hasanuddin ini. Atas doa, semangat dan dukungannya penulis ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhir kata, penulis berharap saran kritik yang dapat membangun skripsi penelitian ini, karena penulis mengetahui dan sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak hal yang mesti untuk disempurnakan. Demikianlah penyusunan skripsi penelitian penulis selesaikan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makasssar, 17 Agustus 2023

Muthmainnah Putri H.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Gender	10
2.2 Konsep Pengarusutamaan Gender	13
2.3 Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender	15
2.4 Perencanaan	17
2.5 Pelaksanaan.....	17
2.6 Pengorganisasian.....	18
2.7 Kerangka Konseptual	20
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1 Tipe Dasar Penelitian	21
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	22
3.3 Informan Penelitian.....	22
3.4 Teknik Pengumpulan Data	23

3.5 Analisis Data.....	23
3.6 Jenis Data.....	24
3.7 Fokus Penelitian	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
4.1 Gambaran Umum	27
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Polewali Mnadar	27
4.1.2 Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar	43
4.1.3 Gambaran Umum Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar	62
4.1.4 Gambaran Umum Dinas Sosial	64
4.2 Pembahasan Dan Hasil Penelitian	82
4.2.1 Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Polewali Mandar	83
4.2.1.1 Perencanaan	84
4.2.1.2 Pelaksanaan.....	88
4.2.1.3 Pengorganisasian.....	95
4.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Polewali Mandar	99
4.2.2.1 Faktor-faktor Pendukung Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Polewali Mandar	99
4.2.2.2 Faktor-faktor Penghambat Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Polewali Mandar	101
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	106
5.1 Kesimpulan	106
5.2 Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual.....	20
Gambar 1.2 Piramida Penduduk Kabupaten Polewali Mandar, 2021.....	35
Gambar 1.3 Presentase Pegawai Negeri Sipil menurut kelompok umur di Kabupaten Polewali Mandar, 2021.....	38
Gambar 1.4 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di kabupaten di Polewali Mandar 2014-2021.....	43
Gambar 1.5 Strustur Organisasi Dinas P2KBP3A.....	45
Gambar 1.6 Struktur Organisasi Balitbanbrenng.....	64
Gambar 1.7 Struktur Organisasi Dinas Sosial.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Indeks Pembangunan Manusia di Kab. Polewali Mandar.....	4
Tabel 1.2	Indeks Pembangunan Gender di Kab. Polewali Mandar.....	4
Tabel 1.3	Indeks Pemberdayaan Gender di Kab Polewali Mandar.....	5
Tabel 1.4	Daftar Nama-nama Bupati Polewali Mandar 1960 -2021.....	29
Tabel 1.5	Letak Geografiis Menurut Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar, 2021.....	32
Tabel 1.6	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Polewali Mandar,2021.....	33
Tabel 1.7	Kondisi Topografi Kabupaten Polewali Mandar 2012-2023.....	36
Tabel 1.8	Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar, 2017-2021.....	37
Tabel 1.9	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Menurut Jenis Pendapat (ribu rupiah) 2020 2021.....	39
Tabel 1.10	Keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas P2KBP3A Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Golongan Ruang.....	58
Tabel 1.11	Keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) DP2KBP3A Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Eselon dan Fungsional.....	59
Tabel 2.12	Keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) DP2KBP3A Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Pendidikan.....	59
Tabel 2.13	Keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) DP2KBP3A Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Diklat Kepemimpinan.....	60

ABSTRAK

MUTHMAINNAH PUTRI HUSAENI, Nomor Induk Mahasiswa E051191044, Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN GENDER DALAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR”**, di bawah bimbingan Prof. Dr. Nurlinah, M.Si. selaku pembimbing utama dan Bapak Rahmatullah, S.IP, M.Si. selaku pembimbing pendamping.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam upaya Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Polewali Mandar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara, studi kepustakaan, dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, proses analisis yang dilakukan merupakan suatu proses yang panjang. Data dari hasil wawancara dan kepustakaan yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah hasil catatan lapangan.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Polewali Mandar dilaksanakan berdasarkan tiga, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengorganisasian. Dalam perencanaan, pemerintah menyusun anggaran yang responsif gender dan juga pengarusutamaan gender sebagai salah satu indikator RPJMD. Dalam Pelaksanaan, Dinas P2KBP3A telah melakukan sosialisasi mengenai pengarusutamaan gender dan pelatihan secara berkala terhadap tiap tiap Organisasi Perangkat Daerah agar dapat menyusun gap analysis. Dalam pengorganisasi, Pemerintah membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang terdiri dari OPD yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Implementasi pengarusutamaan gender bukanlah persoalan yang sederhana. Implementasi pengarusutamaan gender harus dilaksanakan secara menyeluruh, Pemerintah juga perlu melaksanakan program – program pengarusutamaan gender yang lebih inovatif sehingga masyarakat akan lebih tertarik dalam memerhatikan dan turut berpartisipasi dalam perwujudan pengarusutamaan gender.

Kata Kunci: Pemberdayaan Gender, Pengarusutamaan Gender, Perencanaan, Pelaksanaan, Pengorganisasian

ABSTRACT

MUTHMAINNAH PUTRI HUSAENI, Student Identification Number E051191044, Government Science study program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. Thesis entitled "**Implementation Of Gender Empowerment In Gender Mainstreaming In Polewali Mandar Regency**", under the guidance of Prof. Dr. Nurlinah, M.Si. as the main supervisor and Mr. Rahmatullah, S.IP, M.Si. as the co-supervisor.

The purpose of this study is to find out how planning, implementing and organizing in Gender Mainstreaming efforts in Polewali Mandar District. Data collection techniques are carried out through observation methods, interviews, literature studies, documentation. The data obtained is then analyzed simultaneously with the data collection process, the analysis process carried out is a long process. Data from interviews and literature obtained are then recorded and collected so that they become a result of field notes.

The results of the research obtained showed that the implementation of gender mainstreaming in Polewali Mandar Regency was carried out based on three, namely Planning, Implementation, and Organizing. In planning, the government prepares a gender-responsive budget and also gender mainstreaming as one of the RPJMD indicators. In implementation, the P2KBP3A Office has conducted socialization on gender mainstreaming and regular training for each Regional Apparatus Organization in order to be able to analyze gap analysis. In organizing, the Government formed a Working Group on Gender Mainstreaming consisting of OPDs in Polewali Mandar District. The implementation of gender mainstreaming is not a simple matter. The implementation of gender mainstreaming must be implemented comprehensively, the Government also needs to implement more innovative gender mainstreaming programs so that the public will be more interested in paying attention and participating in the realization of gender mainstreaming.

Keywords: Gender empowerment, gender mainstreaming, planning, implementation, organization

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesetaraan gender masih menjadi isu hangat untuk di perbincangkan. Konsep gender sendiri mengacu pada sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan baik secara sosial maupun kultural, dimana terdapat pembagian tugas, kedudukan dan peran yang di tentukan berdasarkan sifat-sifat yang di anggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dapat di katakan bahwa gender adalah jenis kelamin sosial yang digunakan untuk menggambarkan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian diperkenalkan, di pertahankan dan di sosialisasikan melalui perangkat-perangkat sosial dan norma hukum yang tertulis maupun tidak tertulis dalam masyarakat.

Isu gender merupakan permasalahan yang di akibatkan karena adanya kesenjangan atau ketimpangan gender yang berimplikasi adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak (perempuan dan laki-laki). Dengan adanya diskriminasi terhadap perempuan atau laki-laki dalam hal akses dan kontrol atas sumber daya, kesempatan, status, hak, peran dan penghargaan, akan tercipta kondisi yang tidak adil gender.

Secara legal berdasarkan hukum pelaksanaan kesetaraan gender harus wajib dilakukan karena telah tertuang dalam Inpres No.

9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Inpres ini menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, sampai kepada Bupati ataupun Walikota untuk melaksanakan dan menerapkan pengarusutamaan gender agar terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantapan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berspektif gender yang sesuai dengan bidang, tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

Pengarusutamaan Gender merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Pengarusutamaan Gender (PUG) jadi suatu strategi yang dibentuk dengan iktikad supaya terintegrasinya perspektif gender jadi satu ukuran integral dalam perencanaan, penataan, penerapan, pemantauan serta penilaian dari seluruh kebijakan dan program pembangunan. Dengan diintegrasikannya PUG dalam siklus perencanaan serta penganggaran baik di tingkatan pusat ataupun wilayah dengan harapan supaya bisa mendesak alokasi sumber

energi pembangunan sehingga jadi lebih efisien, bertanggung jawab, dan adil dalam pemberian khasiat pembangunan untuk penduduk Indonesia secara menyeluruh, baik wanita ataupun pria.

Pada tingkatan yang lebih rendah, dasar hukum pelaksanaan PUG juga diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011. Beberapa daerah telah merespons keberadaan instrumen hukum yang mengatur mengenai PUG dengan mengeluarkan peraturan daerah (perda) yang berkaitan dengan PUG.

Untuk mengetahui kesenjangan antara laki-laki dan perempuan baik terhadap peran dalam pembangunan maupun peran dalam ekonomi dan politik yaitu melalui perhitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM yang memperhatikan ketimpangan Gender. Yang kedua adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang merupakan indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam berbagai aktivitas kehidupan ekonomi dan politik yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumberdaya ekonomi.

Di Kabupaten Polewali Mandar dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama tahun 2019-2022 mengalami peningkatan

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kab. Polewali Mandar 2019-2022

Wilayah	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Polewali Mandar	63,74	63,84	64,23	64,79

sumber data: Badan pusat statistik Provinsi Sulawesi barat, 2022

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Polewali Mandar, selama tahun 2019-2021 mengalami peningkatan, walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan namun di tahun 2021 IPG Polewali Mandar mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan mempertimbangkan aspek gender.

Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kab. Polewali Mandar 2019-2020

Wilayah	Indeks Pembangunan Gender		
	2019	2020	2021
Kabupaten Polewali Mandar	91,57	91,56	91,63

sumber data: Badan pusat statistik Provinsi Sulawesi barat, 2022

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Polewali Mandar selama tahun 2019-2021 mengalami terus penurunan

hingga ditahun 2021. Indeks pemberdayaan gender merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam perlemen, partisipasi ekonomi, dan pengambilan keputusan

Tabel 1.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kab Polewali Mandar 2019-2021

Wilayah	Indeks Pemberdayaan Gender		
	2019	2020	2021
Kabupaten Polewali Mandar	72,21	71,94	65,93

sumber data: Badan pusat statistik Provinsi Sulawesi barat, 2022

Berdasarkan data diatas, secara umum IDG menunjukkan bahwa terjadi penurunan dalam pemberdayaan perempuan di kabupaten Polewali Mandar dalam masa periode 2019 hingga tahun 2021. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan pertumbuhan yang ditunjukkan dalam indeks pembangunan manusia dan indeks pembangunan gender. Kontras antar data tersebut menjelaskan bahwa masih terdapat kesenjangan gender di kabupaten Polewali Mandar.

Di Kota Polewali Mandar Pengarusutamaan Gender diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) nomor 40 tahun 2020 yaitu tentang

Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan dalam Pembangunan Daerah. Polewali Mandar berkomitmen mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang.

Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah merancang strategi yang perlu dilakukan dalam memperkuat kesadaran dan analisis dalam Pengarusutamaan Gender seperti pembangunan yang berwawasan gender bagi seluruh orang di negara Indonesia dan menguatkan strategi Pengarusutamaan Gender dalam siklus program baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi. Dengan demikian setiap program dan kebijakan yang di sahkan menjadi program dan kebijakan yang responsive gender bukan program dan kebijakan yang bias gender (KPPA,2020)

Perencanaan dan Pelaksanaan, Dalam Perencanaan Pembangunan Pengarusutamaan dibedakan atas Perencanaan Kebijakan, Program dan Perencanaan Responsif Gender juga disertai dengan Perencanaan Anggaran yang Responsif Gender. Perencanaan Responsif Gender adalah Perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki. Sedangkan, Perencanaan Anggaran yang Responsif Gender (ARG) adalah Anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi,

pengambilan keputusan, mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.

Pengorganisasian, dalam pengorganisasian adanya pembentukan Focal Point dan Kelompok Kerja. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing. Sedangkan, Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja) adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga daerah.

Berangkat dari uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai bagaimana Kabupaten Polewali Mandar dalam mewujudkan kesetaraan gender, sehingga mengangkat judul penelitian **“Pelaksanaan Pemberdayaan Gender dalam Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Polewali Mandar”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam upaya Pemberdayaan Gender Dalam Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Polewali Mandar?

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Pemberdayaan Gender dalam Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Polewali Mandar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam upaya Pemberdayaan Gender Dalam Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Polewali Mandar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pemberdayaan Gender Dalam Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Polewali Mandar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat menambah perspektif civitas academia bagi prodi Ilmu Pemerintahan, sebagai bahan kajian dalam proses pelaksanaan pemberdayaan gender dalam pengarusutamaan gender.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan menjadi referensi bagi masyarakat secara meluas tentang bagaimana Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengorganisasian Pengarusutamaan gender di Kabupaten Polewali Mandar.

3. Manfaat Metodologi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, terutama yang berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gender

Konsep penting yang perlu dipahami dalam rangka membahas hubungan kaum perempuan dan laki-laki adalah membedakan antara konsep sex (jenis kelamin) dan konsep gender. Pemahaman dan perbedaan antara kedua konsep tersebut sangat diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Hal ini disebabkan karena ada kaitan yang erat antara perbedaan gender (gender differences) dan ketidakadilan gender (gender inequalities) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara luas. Pemahaman atas konsep gender sangatlah diperlukan mengingat dari konsep ini telah lahir suatu analisis gender (Mansour, 1997:4).

Istilah gender digunakan berbeda dengan sex. Gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya. Sementara sex digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Istilah sex lebih banyak berkonsentrasi pada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sementara itu, gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non-biologis lainnya (Umar, 1999:35). Perbedaan gender (gender differences)

pada proses berikutnya melahirkan peran gender (gender role) dan dianggap tidak menimbulkan masalah, maka tak pernah digugat. Akan tetapi yang menjadi masalah dan perlu digugat adalah struktur ketidakadilan yang ditimbulkan oleh peran gender dan perbedaan gender (Lubis, 2003: 47).

Predikat laki-laki dan perempuan dianggap sebagai simbol status. Laki-laki diidentifikasi sebagai orang yang memiliki karakteristik kejantanan (masculinity), sedangkan perempuan diidentifikasi sebagai orang yang memiliki karakteristik kewanitaan (femininity). Perempuan dipersepsikan sebagai Wanita cantik, langsing, dan lembut, sebaliknya laki-laki dipersepsikan sebagai manusia perkasa, tegar dan agresif. Dominasi laki-laki dalam masyarakat bukan hanya karena mereka jantan, lebih dari itu karena mereka mempunyai banyak akses kepada kekuasaan untuk memperoleh status. Mereka misalnya mengontrol lembaga-lembaga legislatif, dominan di lembaga-lembaga hukum dan peradilan, pemilik sumber-sumber produksi, menguasai organisasi keagamaan, organisasi profesi dan lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Sementara perempuan ditempatkan pada posisi inferior. Peran mereka terbatas sehingga akses untuk memperoleh kekuasaan juga terbatas, akibatnya perempuan mendapatkan status lebih rendah dari laki-laki. Sebagai ibu atau sebagai istri mereka memperoleh kesempatan yang terbatas untuk berkarya di luar rumah. Penghasilan mereka sangat tergantung pada kerelaan laki-

laki, meskipun bersama dengan anggota keluarganya merasakan perlindungan yang diperoleh dari suaminya (Umar, 1999: 75).

Sementara itu menurut Ritzer dan Goodman (2003: 420) ada empat tema yang menandai teori ketimpangan gender. Pertama, laki-laki dan perempuan diletakkan dalam masyarakat tak hanya secara berbeda, tetapi juga timpang. Secara spesifik, perempuan memperoleh sumber daya material, status sosial, kekuasaan dan peluang untuk mengaktualisasikan diri lebih sedikit daripada yang diperoleh laki-laki yang membagi-bagi posisi sosial mereka berdasarkan kelas, ras, pekerjaan, suku, agama, pendidikan, kebangsaan atau berdasarkan faktor sosial penting lainnya. Kedua, ketimpangan gender berasal dari organisasi masyarakat, bukan dari perbedaan biologis atau kepribadian penting antara laki-laki dan perempuan. Ketiga, meski manusia secara individual memiliki perbedaan ciri dan karakter satu sama lain, namun tidak ada pola perbedaan alamiah signifikan yang membedakan laki-laki dan perempuan. Pengakuan akan ketimpangan gender berarti secara langsung menyatakan bahwa perempuan secara situasional kurang berkuasa dibanding laki-laki untuk memenuhi kebutuhan mereka bersama laki-laki dalam rangka pengaktualisasian diri. Keempat, semua teori ketimpangan gender menganggap laki-laki maupun perempuan akan menanggapi situasi dan struktur sosial yang semakin mengarah ke persamaan derajat (egalitarian) dengan

mudah dan secara ilmiah. Dengan kata lain, mereka berkeyakinan akan adanya peluang untuk mengubah situasi.

2.2 Konsep Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan pemberdayaan perempuan, implementasinya melalui prinsip kesetaraan dan keadilan gender harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan dalam pembangunan. Pembangunan kualitas hidup manusia dilaksanakan secara terus menerus oleh pemerintah dalam upaya mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Tujuan PUG adalah mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam pembangunan. Oleh karena itu PUG bertugas untuk mempengaruhi atau mengintervensi berbagai kebijakan agar presponsif Gender. Kesetaraan dan keadilan Gender adalah suatu kondisi yang setara dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, control dan manfaat pembangunan, baik didalam maupun diluar rumah tangga.

Penyelenggaan pangarusutamaan gender mencakup baik pemenuhan kebutuhan praktis gender maupun pemenuhan kebutuhan strategis gender. Kebutuhan praktis gender adalah kebutuhan-kebutuhan jangka pendek dan berkaitan dengan perbaikan kondisi perempuan dan/atau laki-laki guna menjalankan

peran-peran sosial masing-masing, seperti perbaikan taraf kehidupan, perbaikan pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, penyediaan air bersih, dan pemberantasan buta aksara. Kebutuhan strategis gender adalah kebutuhan perempuan dan/atau laki-laki yang berkaitan dengan perubahan pola relasi gender dan perbaikan posisi perempuan dan/atau laki-laki, seperti perubahan di dalam pola pembagian peran, pembagian kerja, kekuasaan dan kontrol terhadap sumberdaya. Pemenuhan kebutuhan strategis ini bersifat jangka panjang, seperti perubahan hak hukum, penghapusan kekerasan dan deskriminasi di berbagai bidang kehidupan, persamaan upah untuk jenis pekerjaan yang sama, dan sebagainya.

Pada dasarnya pengarusutamaan gender adalah menarik perempuan ke dalam arus utama pembangunan bangsa dan masyarakat sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan gender berfungsi untuk menciptakan mekanisme-mekanisme kelembagaan bagi kemajuan perempuan di semua bidang kegiatan dan kehidupan masyarakat dan pemerintahan.

2.3 Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender

Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender atau yang biasa disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga daerah. Pokja PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.

Dibentuknya Pokja adalah untuk melembagakan dan mengoptimalkan penyelenggaraan PUG di daerah. Pokja beranggotakan Perangkat Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha, Media dan Perguruan Tinggi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. Untuk melembagakan PUG, kepala daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa membentuk focal point. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing. Pelaksanaan Pembentukan kelompok kerja pengarusutamaan gender di Kabupaten Polewali Mandar di ditetapkan dengan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 537 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Polewali Mandar

Tugas Kelompok Kerja PUG:

- a. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD
- b. Melaksanakan sosialisasi dan advikasi PUG kepada Camat, Kepala Desa dan Lurah
- c. Menyusun program kerja setiap tahun
- d. Mendorong terwujudnya anggaran yang responsive gender
- e. Menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun
- f. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati
- g. Memfasilitasi SKPD atau Unit Kerja yang membidangi pendataan untuk Menyusun profil gender Kabupaten
- h. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi
- i. Menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah
- j. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten
- k. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD, dan
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Wakil Bupati.

2.4 Perencanaan

Perencanaan merupakan proses awal dalam suatu manajemen yang akan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap proses-proses manajemen berikutnya. Menurut Malayu Hasibuan (2007: 40) perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Pendapat berikutnya juga dikemukakan oleh Chuck Williams (2001: 143) yang menyatakan “perencanaan adalah memilih suatu tujuan dan mengembangkan suatu metode atau strategi untuk mencapai tujuan”.

Sedangkan menurut Siswanto (2007: 51) menyatakan “Perencanaan merupakan suatu aktivitas universal manusia, suatu keahlian dasar dalam kehidupan yang berkaitan dengan pertimbangan suatu hasil sebelum diadakan pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Berdasarkan definisi para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan mengembangkan suatu metode dan strategi untuk mencapai tujuan dengan memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang ada.

2.5 Pelaksanaan

Pelaksanaan atau implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang/berkepentingan baik

pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita - cita/tujuan yang telah ditetapkan

Selanjutnya menurut Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab (2008:68) Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Sedangkan Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2008:65) mengemukakan pengertian Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2003:7) mengemukakan bahwa "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan".

2.6 Pengorganisasian

Malayu Hasibuan (2007: 118-119) menyatakan "Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut".

Sedangkan Siswanto (2007: 75) menyatakan : Pengorganisasian (organizing) adalah pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kesatuan pekerjaan, penetapan hubungan antar pekerjaan yang efektif diantara mereka, dan pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang wajar sehingga mereka bekerja secara efisien.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Sondang P.Siagian (2003: 95) yang menyatakan bahwa pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugastugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh ketiga ahli di atas, maka kegiatan pengorganisasian dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan proses penentuan, pengelompokkan, dan pengaturan serta pendelegasian orang, alat, tugas, serta wewenang dan tanggung jawab sehingga tercipta suatu kesatuan organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2.7 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian

Gambar 1.1 Kerangka Konsep

